

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan, bagi suatu negara yang ingin maju. Demikian juga Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, semua pembangunan ini dilaksanakan sebaik mungkin agar cita-cita bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses berencana dari suatu situasi menuju ke situasi Nasional yang dinilai lebih baik. Telah ditegaskan dalam GBHN bahwa “Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuannya adalah terbinanya kesetabilan politik serta kesatuan bangsa, untuk itu diperlukan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara yang diarahkan pada

pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasil diseluruh tanah air.

Ditingkat regional upaya ini ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap aspek-aspek pembangunan melalui peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah daerah berupaya menggali segala potensi yang ada di daerahnya sehingga hasil pemanfaatannya dapat dirasakan merata diseluruh daerahnya, dengan demikian perlu diupayakan keselarasan dan kesinambungan antara berbagai sektor yang terkait sehingga pembangunan dilaksanakan di daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tentunya tidak lepas dari keberhasilan pembangunan didaerah. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini di mana perhatian pemerintah semakin meningkat terhadap pembangunan melalui peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan wilayahnya.

Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan dilimpahkan kepada daerah. Peranan keuangan daerah akan semakin penting, karena daerah dituntut lebih aktif dalam memobilisasikan dananya sendiri dan mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Dengan demikian, untuk merealisasikan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana guna membiayai pemerintahannya. Berhubungan dengan hal tersebut Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU. No 33 Tahun 2004 terdiri dari : (Kuncoro, 2004):

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- (b) Dana Perimbangan,
- (c) Pinjaman daerah dan
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat).

Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu:

- (a). Pajak Daerah
- (b). Restribusi Daerah,
- (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah.

Selain konsep otonomi daerah diatas, hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan PAD adalah konsep pembangunan industri. Konsep pembangunan industri seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi, oleh karena itu seringkali dianggap sama. Proses industrialisasi dan pembangunan industri ini sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain, pembangunan industri itu merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok

kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara “vertikal” semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara “horizontal” semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah.

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran /periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Sehingga nantinya akan tercipta peluang kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kenaikan pendapatan dan peningkatan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh dan sehat. Maka pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan industri yang ada. Dan diharapkan dengan pembangunan industri tersebut maka akan tersedia lapangan kerja di kabupaten Tasikmalaya sehingga nantinya perekonomian bisa tumbuh sesuai dengan

yang diharapkan. Selain itu pendapatan asli daerah kabupaten Tasikmalaya juga bisa ditingkatkan, ini dikarenakan dengan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat maka kemampuan mereka membayar pajak juga akan meningkat sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya juga meningkat.

Untuk menunjang keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Tasikmalaya maka harus diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhinya, beberapa faktor tersebut antara lain adalah faktor administrasi dan faktor non administrasi. Faktor administrasi yang mempengaruhi antara lain keefektifan penentuan penetapan, keefektifan pemungutan, dan kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan variabel non administrasi yang mempengaruhi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan sebagainya. (Jeny Aan Listiawan, 2001).

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya dapat kita lihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut perkembangan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Misalnya saja pada tahun 1992, besarnya PAD adalah Rp. 5.380.487 ribu rupiah naik menjadi Rp. 6.572.064. Demikian seterusnya perkembangan PAD kabupaten Tasikmalaya sampai tahun 2000 terus mengalami kenaikan. Dan pada tahun tersebut adalah jumlah tertinggi dari PAD sebelum adanya otonomi daerah, yaitu sebesar Rp.14.842.527 ribu rupiah.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 1992-2004 (ribu rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>
<b>1992</b>	<b>5.380.487</b>
<b>1993</b>	<b>6.572.064</b>
<b>1994</b>	<b>7.808.078</b>
<b>1995</b>	<b>8.987.081</b>
<b>1996</b>	<b>1.0701.137</b>
<b>1997</b>	<b>1.1894.855</b>
<b>1998</b>	<b>1.3299.015</b>
<b>1999</b>	<b>1.3977.405</b>
<b>2000</b>	<b>14.842.527</b>
<b>2001</b>	<b>25.306.071</b>
<b>2002</b>	<b>9.565.733</b>
<b>2003</b>	<b>18.659.211</b>
<b>2004</b>	<b>20.568.895</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya

Tetapi setelah diterapkannya sistem otonomi daerah yang berlaku mulai tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah melonjak drastis yaitu mencapai angka Rp. 25.306.071 ribuan rupiah dan hal itu tentu saja dikarenakan sebagian besar pendapatan daerah benar-benar dialokasikan di daerahnya masing-

masing dan dana yang masuk ke pemerintah pusat hanya beberapa persen saja. Sementara itu otonomi daerah juga membawa dampak terhadap penurunan PAD kabupaten Tasikmalaya. Ini dikarenakan terjadi pemekaran wilayah pemerintahan menjadi pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kabupaten sehingga pendapatan daerah yang semula dialokasikan di daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagian dialokasikan ke Pemerintahan Kota Tasikmalaya sehingga besarnya PAD kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2002 hanya sebesar Rp. 9.565.733 ribu rupiah, jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang mencapai Rp.25.306.071 ribu rupiah penurunannya sangat jauh sekali. Namun pada tahun 2003 dan 2004 PAD Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami kenaikan besarnya adalah Rp.18.659.211 ribu rupiah dan Rp.20.568.895 ribu rupiah.

Konsep otonomi daerah juga tidak terlepas dari peran PDRB atau pendapatan perkapita. Sesuai konsep yang digunakan, pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional dengan penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung neto ditambah arus pendapatan dari luar Kabupaten Tasikmalaya.

Data penyusun, pajak tak langsung dan arus pendapatan, pada saat ini belum dapat dihitung. Sehingga kita asumsikan pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita adalah kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan pada tahun bersangkutan yang belum tentu pendapatan tersebut seluruhnya diterima masyarakat itu.

Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB perkapita di Kabupaten Tasikmalaya lihat tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**PDRB Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2000-2003 (juta rupiah)**

Tahun	Kabupaten Tasikmalaya	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga konstan (1993)
2000	2.456.376,92	1982.846
2001	2.553.390,19	663.737
2002	2.883.929,89	696.909
2003	3.096.904,13	723.234

Sumber: BPS Tasikmalaya

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Tasikmalaya atas harga berlaku setahun sebelum diberlakukannya otonomi daerah yaitu tahun 2000 sebesar Rp. 2.456.376,92 setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.553.390,19 begitu juga selama waktu 2001-2003 atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp. 212.974,24 atau sebesar 7,38 persen. Namun atas dasar harga konstan sebelum diberlakukannya otonomi daerah besarnya adalah Rp.1.982.846 juta rupiah.



Setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, besarnya PDRB pada tahun 2001 turun menjadi Rp.663.737 juta rupiah. Tetapi pada tahun berikutnya PDRB atas dasar harga konstan terus mengalami kenaikan, Rp.696.909 juta rupiah pada tahun 2002 dan Rp.723.234 juta rupiah pada tahun 2003

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah industri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?
4. Apakah kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?
5. Apakah jumlah industri, jumlah penduduk dan PDRB serta kebijakan otonomo daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah industri terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Untuk mengetahui apakah jumlah industri, jumlah penduduk dan PDRB serta kebijakan otonomi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- b. Penelitian ini sangat bermanfaat dalam usaha untuk memecahkan permasalahan secara ilmiah dan sistematis berdasarkan ilmu atau teori yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- c. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
- d. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II. TINJAUAN UMUM SUBJEK PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian atau gambaran umum atas subyek penelitian yang diambil dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai gambaran secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

##### **BAB III. KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

##### **BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi dua bagian: *pertama*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi

landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. *Kedua*, hipotesis merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

## **BAB V. METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

## **BAB VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

## **BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.